

JAWABAN TUGAS 1

Rhiza S. Sadjad

NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode/Nama MK : **ISIP4214.66/Sistem Sosial Budaya Indonesia 66**
Tugas : 1

Tugas 1/3

1. Lembaga sosial atau institusi sosial dapat terbentuk dengan sendirinya dalam masyarakat tetapi anggota masyarakat juga dapat membentuk lembaga sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Terdapat delapan lembaga sosial atau institusi sosial yang sering dijumpai dalam masyarakat menurut Koentjaraningrat (1990:167). Jelaskan delapan lembaga sosial atau institusi sosial yang sering ditemui di masyarakat dan berikan contoh

Jawaban 1/3:

Menurut Koentjaraningrat, ada 8 (delapan) lembaga sosial atau pranata sosial yang tumbuh di masyarakat, yaitu:

1. **Lembaga Ilmiah** (*Scientific Institutions*), yaitu lembaga yang dibentuk untuk mengembangkan ilmu-pengetahuan, contohnya misalnya BRIN, serta lembaga-lembaga penelitian di perguruan tinggi.
2. **Lembaga Seni dan Hiburan** (*Aesthetic and Recreational Institutiions*), yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan dan kesenian, contohnya misalnya “*Srimulat*” di Surabaya, sanggar-sanggar musik, tari, melukis, teater, dan lain-lain.
3. **Lembaga Kekerabatan atau Domestik** (*Kinship/Domestic Indtitutions*), yaitu lembaga-lembaga sosial yang dibentuk untuk keberlangsungan reproduksi, afeksi, sosialisasi dan perlindungan, contohnya adalah perkawinan dan keluarga, sebagai unit terkecil bagian dari masysrakat.
4. **Lembaga Ekonomi** (*Economic Institutions*), yaitu lembaga-lembaga sosial untuk memproduksi, men-distribusi-kan dan meng-konsumsi, baik barang mau pun jasa, yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai kegiatan ekonomi yang mendasar. Lembaga ekonomi juga berfungsi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Contoh lembaga ekonomi adalah perusahaan-perusahaan dagang, industri, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan lain-lain.
5. **Lembaga Pendidikan dan Kesehatan** (*Educational and Health Institutions*), yaitu lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, baik pendidikan formal seperti contohnya sekolah dan perguruan tinggi, mau pun pendidikan informal dan non-formal, seperti contohnya kursus-kursus, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan lain-lain, serta

lembaga-lembaga penyelenggara fasilitas kesehatan, seperti rumah-sakit, puskesmas, posyandu, *fitness center*, dan lain-lain.

6. **Lembaga Keagamaan** (*Religious Institutions*), yaitu lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang keagamaan, termasuk di antaranya rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan lain-lain, organisasi-organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, serta organisasi-organisasi seperti MUI, Dewan Gereja, ormas-ormas keagamaan, dan lain-lain.
7. **Lembaga Politik** (*Political Institutions*), yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang politik, mengikuti kontestasi kepala-kepala daerah, dari desa, kabupaten/kota, sampai gubernur dan presiden, anggota-anggota legislatif, dan lain-lain, dalam rangka perebutan kekuasaan, termasuk contohnya adalah partai-partai politik, kelompok-kelompok relawan yang mengusung seorang kandidat, dan seterusnya. Pemerintahan negara merupakan institusi politik yang terbesar.
8. **Lembaga Hukum dan Keamanan** (*Law and Security Institutions*), yaitu lembaga-lembaga sosial-kemasyarakatan yang menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, contohnya lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, SATPOL PP, tentara, kelompok-kelompok preman, dan lain-lain.

Tugas 2/3

2. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang atau bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa Indonesia lain yang disahkan melalui undang-undang. Jelaskan hal-hal yang dapat dilakukan untuk melihat dimana setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri tersendiri yang merupakan suatu kesatuan dengan daerah tempat suku bangsa itu berasal serta berikan contoh yang mendukung jawaban Anda!

Jawaban 2/3:

Menurut hemat saya, persoalan etnisitas atau kesukuan untuk bangsa Indonesia generasi kedua dan selanjutnya sesudah kemerdekaan, boleh dibilang pada umumnya sudah selesai. Tidak ada lagi persoalan. Bahkan beberapa suku bangsa boleh dikatakan sudah punah, misalnya suku Bengkulu, Lampung dan Palembang di Sumatera bagian selatan, serta beberapa suku di Sulawesi. Punahnya suku-suku bangsa dan selesainya persoalan kesukuan dari bangsa Indonesia sebagian besar merupakan dampak dari perkawinan antar-suku. Anak-cucu keturunan hasil perkawinan antar-suku dengan sendirinya akan kehilangan jati diri mereka sebagai bagian dari suatu suku tertentu, kemudian menjadi bangsa Indonesia yang di tubuhnya mengalir darah dari berbagai suku.

Selain perkawinan, persoalan kesukuan juga selesai dengan sendirinya dengan migrasi kependudukan dan mutasi kepegawaian. Istilah “putra daerah” dalam pemilihan untuk mengisi

jabatan-jabatan penting, baik jabatan politis mau pun jabatan teknis, sudah jarang terdengar lagi menjadi persoalan. *Stereotyping*, yang biasanya meng-asosiasi-kan suku-suku tertentu dengan karakter-karakter tertentu juga sudah jarang terjadi.

Faktor lain yang dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi rasa kesukuan adalah pelajaran bahasa daerah di sekolah. Dulu bahasa daerah masih diajarkan di sekolah sampai kelas 3 SMP, atau kelas 9. Sekarang sudah jarang SD yang masih mengajarkan bahasa daerah sampai kelas 6, paling tinggi sampai kelas 3 saja, sedangkan Bahasa Indonesia, bahkan Bahasa Asing (terutama Bahasa Inggris dan Arab) sudah diajarkan di sekolah sejak awal.

Terkait dengan konflik antar suku, bahkan di tempat-tempat yang masih tergolong “primitif” seperti di Papua, sudah hampir tidak pernah terjadi lagi. Berarti hubungan antar-suku sekarang sudah sangat cair. Puluhan tahun yang lalu masih terjadi kasus-kasus perkelahian antar penghuni asrama mahasiswa yang berasal dari daerah yang satu dengan mahasiswa dari daerah yang lain. Sekarang ini yang lebih sering terjadi malah tawuran antar anak-anak sekolah, atau antar kampung di kota-kota besar yang padat penduduk.

Jadi, kesimpulannya, masalah etnisitas atau kesukuan, sekarang ini bukan lagi masalah yang relevan untuk dibahas. Yang ber-potensi menjadi sebab dari disintegrasi bangsa, bukan lagi masalah kesukuan, melainkan masalah keadilan antara pusat dan daerah, serta ke-tidak-merata-an kesejahteraan dan kemakmuran. Satu-satunya konflik yang masih terus terjadi tinggal masalah di Papua, yang dihantui oleh kaum separatis. Menurut hemat saya, satu-satunya solusi yang permanen untuk menyelesaikan masalah separtisme di Papua adalah dengan melepaskan kembali Papua ke masyarakat internasional dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa campur-tangan Jakarta. Sebab kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa, termasuk bangsa Papua, tentunya.

Tugas 3/3

3. Salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia setelah merdeka yaitu masalah integrasi. Integrasi bukan peleburan, tetapi keserasian persatuan. Kuatnya integrasi akan menjadi salah satu ukuran timbul atau tidaknya pemberontakan-pemberontakan di daerah yang cenderung menimbulkan konflik. Jelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam integrasi dan berikan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah permasalahan integrasi nasional.

Jawaban 3/3:

Sebagaimana diuraikan dalam jawaban untuk pertanyaan nomer 2/3 di atas, ancaman disintegrasi bangsa saat ini dibandingkan dengan pada awal-awal kemerdekaan sudah sangat jauh berkurang. Masalah kesukuan sudah terbilang selesai setelah generasi kedua. Mungkin ada saja yang masih “*phobia*” dengan suku dan agama sebagai faktor yang bisa mengakibatkan perpecahan.

Kekhawatiran ini di-latar-belakangi oleh peristiwa-peristiwa traumatis yang dialami bangsa ini seperti di Ambon, Poso, Kalimantan. Sebagaimana juga masalah ideologis yang mengakibatkan banjir darah tahun 1965. Tapi tentu generasi millennial misalnya, apalagi generasi Y dan Z, yang tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa berdarah yang mengerikan itu, dan mengetahuinya hanya dari cerita-cerita orang-orang tua mereka, tidak merasakan adanya trauma atau pun *phobia* lagi. Apalagi dalam era digital, kebanyakan persoalan dan konflik terkait suku, agama dan ideologi, cukup diselesaikan di “dunia maya” saja, tanpa harus menjalar menjadi konflik fisik horizontal seperti pada masa-masa yang telah lalu.

Pada masa sekarang, dan masa yang akan datang, masalah disintegrasi bangsa akan lebih banyak di-latar-belakang-i oleh masalah ke-tidak-adil-an dan kesenjangan, baik ke-tidak-adil-an dan kesenjangan antar daerah (antara Jawa dengan Luar Jawa, antara Indonesia Bagian Barat dengan Bagian Timur, antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan, misalnya), mau pun ke-tidak-adil-an dan kesenjangan antar strata di masyarakat, antara yang berpendapatan rendah dengan yang berpendapatan tinggi. Ke-tidak-adil-an dan kesenjangan bisa meliputi kesejahteraan dan kualitas kehidupan yang tidak merata, serta kesempatan yang tidak sama untuk memperoleh kehidupan yang layak dalam berbagai sektor, pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Sumber konflik yang paling utama adalah ketika terjadi eksploitasi pada masyarakat di daerah oleh (pemerintah) pusat seperti yang terjadi di Kepulauan Rempang baru-baru ini dan di daerah-daerah lain juga. Eksploitasi ini terjadi akibat dari masih berlanjutnya sistem sentralisasi atau pemusatan kekuasaan ala kolonial, sehingga terjadi “penghisapan” sumber daya alam dan sumber daya manusia dari daerah ke pusat, lalu kemudian ke luar negeri, demi kepentingan asing. Jika kepentingan asing sudah mulai bermain, maka disintegrasi bangsa tinggal menunggu waktu saja. Perjalanan sejarah yang berlangsung sejak tahun 1602 ketika Belanda mendirikan benteng-benteng mereka di Sunda Kelapa, akan berulang kembali dengan “Belanda-Belanda” yang lain.

REFERENSI

1. **Vina Salviana, dkk**, “Sistem Sosial Budaya Indonesia”, Modul 1 – 9, ISIP4214, Edisi 3, [2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
2. **ChatGPT**, [*OpenAI.com*], Aplikasi Chatting berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.